



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2019



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2020**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Denpasar, 10 Pebruari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kotk Denpasar,

Drs. I Komang Sugiarta, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611231 199003 1 1262



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan salah satu unsur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian – capaian kinerja dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Di dalamnya memuat penilaian terhadap unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian kinerja.

Adapun mekanisme penyusunan laporan kinerja meliputi analisa terhadap sinergitas antara pencapaian kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan tujuan serta sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan evaluasi juga terhadap perkembangan capaian tujuan dan sasaran dengan menggunakan informasi atau data – data yang diperoleh secara lengkap.

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada Tahun 2019. Indikator Kinerja Utama merupakan outcome dari program – program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan sebagai dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Persentase menurunnya kasus-kasus sosial;
2. Persentase menurunnya kasus-kasus SARA;
3. Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan;
4. Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat;
5. Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan beberapa program antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
7. Program Peningakatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah menjadi PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar memiliki tugas dan fungsi membantu Walikota Denpasar dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2018 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021.

1.3 Isu Strategis

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang aman, nyaman, dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Denpasar merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primodial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yaitu mengantisipasi berbagai kerawanan sosial, politik yang berdampak pada

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memiliki visi sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman, nyaman dan tenteram dalam menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya.

Upaya kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Aspek wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandang sikap, penghayatan dan perilaku seluruh warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek Politik, yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh keberadaan NKRI, dengan mengembangkan sistem praktik nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju bersatu, demokratis, adil dan makmur. Kota Denpasar merupakan kota yang terbuka, sehingga banyaknya penduduk mendatang dan mobilitas penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban di perkotaan sebagian besar diakibatkan oleh adanya ketidakdisiplinan warga kota terhadap tatanan kehidupan seperti administrasi kependudukan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap tata ruang, pelanggaran dalam bidang bangunan, tempat usaha maupun yang lainnya sehingga menimbulkan kesembrautan kota. Adapun isu strategis di bidang pelayanan keamanan dan ketertiban kota antara lain :

1. Peningkatan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga untuk dapat beraktivitas;
2. Peningkatan jaminan rasa aman dengan memperluas partisipasi semua pihak untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban umum;
3. Peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, Desa Pekraman, Pecalang, dan semua stakeholder yang terkait dalam mengatasi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu guna mengurangi angka golput melalui pendidikan politik.

1.4 Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Denpasar. Pelaksanaan tugas sehari-hari, dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang membawahi 8 (delapan) Sub Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
3. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
 - Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - Sub Bidang Penanganan Konflik
 - Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis
 5. Bidang Politik Dalam Negeri
 - Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu
 - Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
 6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
 - Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2. Tugas Pokok

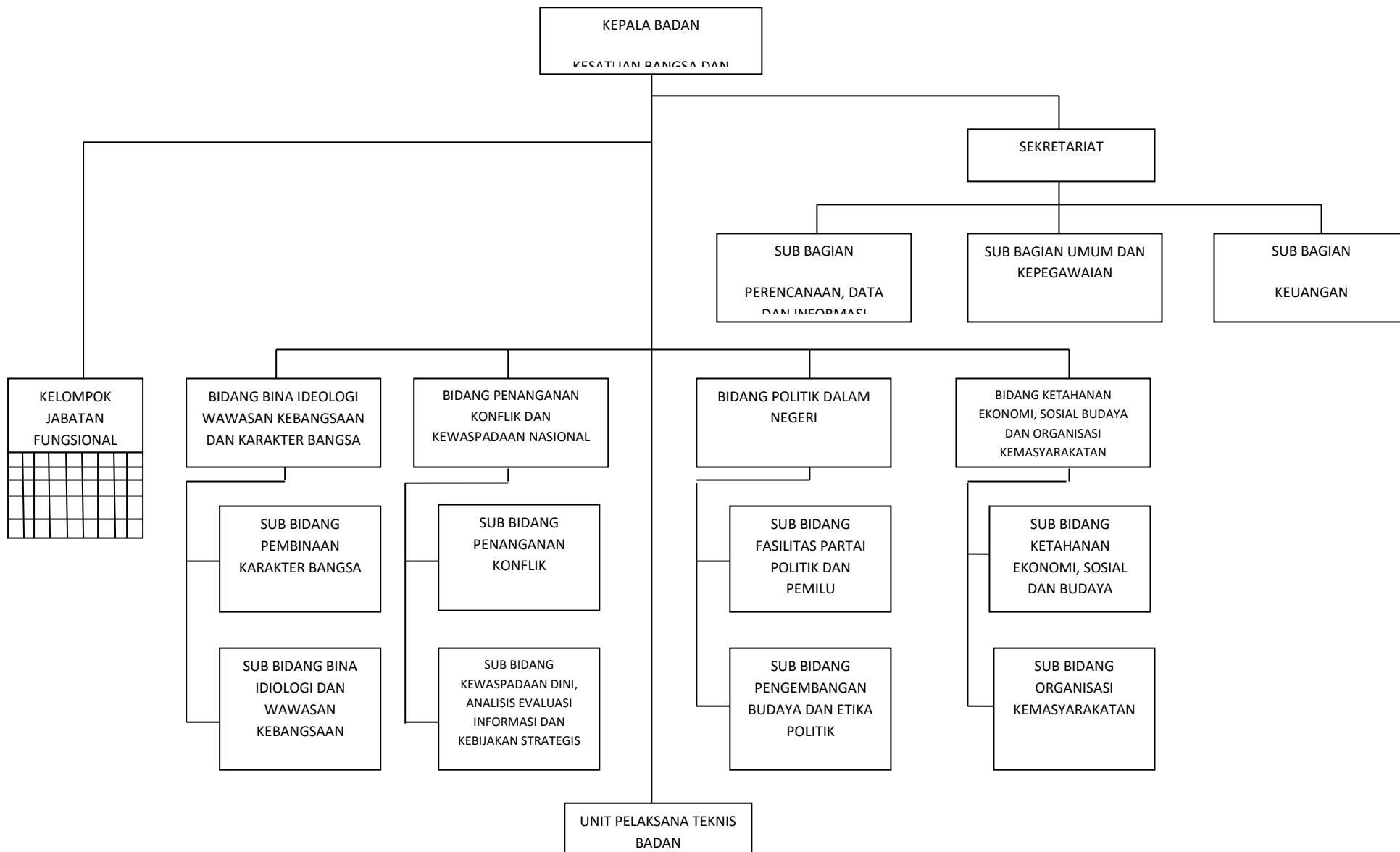
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan fasilitas peningkatan sumber daya manusia Badan Kesbangpol;
- b. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang bidang kesatuan bangsa dan politik;

- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



1.5 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar selama tahun 2019. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kota Denpasar. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

IKTHISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, isu strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2019.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2019.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
4. Rencana Aksi Tahun 2019
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar melalui berbagai kegiatan tahunan.

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 adalah ***“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”*** penjabaran lebih konkretvisi pembangunan dimaksud Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali;
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal;
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*);
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan;
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.

Mengacu pada Visi Pembangunan dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2016–2021, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan Kota Denpasar melalui program – program yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulan. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	60%	70%	80%	90%	95%
			Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	60%	70%	80%	90%	95%
			Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	40%	60%	60%	66,67 %	83,33 %
			Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	60%	70%	80%	90%	95%
			Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	60%	70%	80%	90%	95%

2.1.2 Program Kegiatan

Rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Adapun program dan kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2019 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2
Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi WNA b. Pengamanan Kawasan Sanur c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) d. Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar e. Monitoring/Pemantauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar f. Pelatihan Pecalang Guna Pengendalian, Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa c. Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan d. Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan e. Bimtek Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

No	Program	Kegiatan
6	Program Komitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	a. Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan b. Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
7	Program Peningakatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	a. Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	a. Verifikasi Bantuan Parpol b. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik c. Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Denpasar d. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar e. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dengan telah diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah dengan PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2019 memuat informasi tentang target sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Disamping itu

dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kota Denpasar untuk Tahun 2019, secara rinci dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dan Target Kinerja Tahun 2019

Tugas Pokok : 1 Badan Kesbangpol Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 2 Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	1 Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	Jumlah kasus sosial yang ada dibagi target kasus sosial tiap tahun X 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Laporan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	80%
		2 Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	Jumlah kasus SARA yang ada dibagi target kasus SARA tiap tahun X 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Laporan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	80%

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
		3 Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah partisipasi organisasi kemasyarakatan dibagi target partisipasi organisasi kemasyarakatan X 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Laporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	60%
		4 Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	Jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada dibagi target kasus penyakit masyarakat tiap tahun X 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Laporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	80%
		5 Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	Jumlah yang terdidik dibagi jumlah pemilih X 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Laporan Bidang Politik Dalam Negeri	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2019, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam urusan pelaksanaan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik secara umum dapat dikatakan baik. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh besaran target atas indikator sasaran telah mencapai 100 persen.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Uraian Kinerja Tahun 2019		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realiasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	60%	70%	80%	80%	100%
	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	60%	70%	80%	80%	100%
	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	40%	-	60%	60%	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Uraian Kinerja Tahun 2019		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realiasi	Capaian
	Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	60%	70%	80%	80%	100%
	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	60%	70%	80%	80%	100%

3.2 Pengukuran Kinerja

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 (Data Terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2019 dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut.

Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel, capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Tabel Capaian Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Tahun 2019
1. Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	80%	60%	70%	80%	100%

Pada indikator persentase menurunnya kasus-kasus sosial terjadi peningkatan capaian realisasi, dari capaian di tahun 2017 adalah sebesar 60% naik menjadi 70% pada tahun 2018 dan menjadi 80% di tahun 2019.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Sosial s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	95%	60%	70%	80%	84,21%

Tabel 3.4
***Cost per Outcome* (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Sosial**

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran 2017	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2019	Persentase Realisasi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	Rp 1.479.772.050	Rp 1.071.685.650	Rp 1.806.502.005	Rp 1.407.555.580	95,11%

Tabel 3.5
Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Sosial

Realisasi Kinerja dan Anggaran				Kinerja 2019			Anggaran 2019		
Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
100%	85,95%	100%	91,59%	80%	80%	100%	Rp .050	Rp 1.407.55 5.580	95,11%

Tabel 3.6
Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Sosial

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	100%	95,11%	4,89%

Tabel 3.7
Tabel Capaian Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Tahun 2019
2. Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	80%	60%	70%	80%	100%

Pada indikator persentase menurunnya kasus-kasus SARA terjadi peningkatan capaian realisasi, dari capaian di tahun 2017 adalah sebesar 60% naik menjadi 70% pada tahun 2018 dan menjadi 80% di tahun 2019.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Menurunnya Kasus-Kasus SARA s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	95%	60%	70%	80%	84,21%

Tabel 3.9
Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase Menurunnya Kasus – Kasus SARA

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran 2017	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2019	Persentase Realisasi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	Rp 3.339.634.500	Rp 2.425.585,179	Rp 3.474.255,579	Rp 3.111.443,180	93,16%

Tabel 3.10
Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus SARA

Realisasi Kinerja dan Anggaran				Kinerja 2019			Anggaran 2019		
Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
100%	91,30%	100%	86,00%	80%	80%	100%	Rp 3.339.634,500	Rp 3.111.443,180	93,16%

Tabel 3.11

Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus SARA

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	100%	93,16%	6,84%

Tabel 3.12

Tabel Capaian Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Tahun 2019
3. Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	60%	40%	-	60%	100%

Pada indikator persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan terjadi peningkatan capaian realisasi, dari capaian di tahun 2017 adalah sebesar 40% naik menjadi 60% pada tahun 2019, sedangkan capaian indikator kinerja pada tahun 2018 tidak tercapai disebabkan oleh satu kegiatan tidak terlaksana karena pada saat itu, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) sudah bisa mendanai secara swadaya kegiatannya sehingga tidak perlu dianggarkan dalam APBD melalui kegiatan Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	83,33%	40%	-	60%	72%

Tabel 3.14
Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran 2017	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2019	Persentase Realisasi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Rp 142.257.300	Rp 98.665.500	-	Rp 140.329.800	98,64%

Tabel 3.15
Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Realisasi Kinerja dan Anggaran				Kinerja 2019			Anggaran 2019		
Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
100%	91,30%	-	-	60%	60%	100%	Rp 142.257.300	Rp 140.329.800	98,64%

Tabel 3.16
Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	100%	98,64%	1,36%

Tabel 3.17
Tabel Capaian Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Tahun 2019
4. Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	80%	60%	70%	80%	100%

Pada indikator persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat terjadi peningkatan capaian realisasi, dari capaian di tahun 2017 adalah sebesar 60% naik menjadi 70% pada tahun 2018 dan menjadi 80% di tahun 2019.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Penyakit Masyarakat s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	95%	60%	70%	80%	84,21%

Tabel 3.19
Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase Menurunnya
Kasus – Kasus Penyakit Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran 2017	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2019	Persentase Realisasi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	Rp 21.984.500	Rp 67,420,000	Rp 47.680.875	Rp 20.934.500	95,22%

Tabel 3.20
Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase Menurunnya
Kasus – Kasus Penyakit Masyarakat

Realisasi Kinerja dan Anggaran				Kinerja 2019			Anggaran 2019		
Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
100%	97,47%	100%	97,64%	80%	80%	100%	Rp 21.984.500	Rp 20.984.500	95,22%

Tabel 3.21
Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Penyakit Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	100%	95,22%	4,78%

Tabel 3.22
Tabel Capaian Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Tahun 2019
5. Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	80%	60%	70%	80%	100%

Pada indikator persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik terjadi peningkatan capaian realisasi, dari capaian di tahun 2017 adalah sebesar 60% naik menjadi 70% pada tahun 2018 dan menjadi 80% di tahun 2019.

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	95%	60%	70%	80%	84,21%

Tabel 3.24
***Cost per Outcome* (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik**

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran 2017	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2019	Persentase Realisasi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Rp 165.429.200	Rp 128.848.000	Rp 196.726.545	Rp 153.568.400	92,83%

politik			
---------	--	--	--

Tabel 3.25
Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik

Realisasi Kinerja dan Anggaran				Kinerja 2019			Anggaran 2019		
Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
100%	88,15%	100%	88,26%	80%	80%	100%	Rp 165.429.200	Rp 153.568.400	92,83%

Tabel 3.26
Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100%	92,83%	7,17%

3.3.1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa capaian kinerja mengalami keberhasilan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain.

- Komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders* yang ada dapat berjalan dengan baik dan lancar;
- Partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan sudah meningkat;
- Kemampuan SDM yang dilibatkan dalam menjalani kegiatan – kegiatan yang direncanakan sudah semakin meningkat.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar akan melakukan langkah – langkah sebagai berikut.

- a. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan;
- b. Komunikasi dan koordinasi antar pemegang puncak pimpinan perlu ditingkatkan sehingga gangguan dari kebijakan politik dapat ditekan sekecil-kecilnya;
- c. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
- d. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan.

3.3.2 Cost Per Outcome (Perjanjian Kinerja dan Anggaran)

Secara umum realisasi pencapaian kinerja dan anggaran yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada tahun 2019 telah berjalan efektif dan efisien. Untuk indikator kinerja tingkat efisiensi mencapai 1% hingga 7%, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mencapai target kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar telah efisien dalam memanfaatkan sumber anggaran. Untuk informasi selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.27
Cost per Outcome (Perjanjian Kinerja dan Anggaran)

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2019			Anggaran 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	80%	80%	100%	Rp 1.479.772.050	Rp 1.407.555.580	95,11%
	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	80%	80%	100%	Rp 3.339.634.500	Rp 3.111.443.180	93,16%
	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan	60%	60%	100%	Rp 142.257.300	Rp 140.329.800	98,64%

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2019			Anggaran 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	kebangsaan						
	Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	80%	80%	100%	Rp 21.984.500	Rp 20.934.500	95,22%
	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	80%	80%	100%	Rp 165.429.200	Rp 153.568.400	92,83%

Cost per Outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk masing – masing indikator kinerja yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.28
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	100%	95,11%	4,89%
	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	100%	93,16%	6,84%
	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan	100%	98,64%	1,36

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	kebangsaan			
	Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	100%	95,22%	4,78%
	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100%	92,83%	7,17%

Jumlah keseluruhan pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar berjumlah 67 orang, terdiri dari 27 PNS dan 40 tenaga kontrak. Komposisi pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 17 orang. Mayoritas pegawai memiliki jenjang pendidikan lulusan Strata I (S1) yaitu sebanyak 25 orang dan selebihnya 31 orang lulusan SLTA, sedangkan yang memiliki SDM dengan kualitas lulusan Strata II (S2) sebanyak 11 orang. Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan yang dihadapi lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dicapai seoptimal mungkin.

3.3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Meningkatnya tata kelola	Persentase menurunnya	Pengendalian Keamanan dan	Rp 39.765.500	Rp 38.290.500	96,29

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
pemerintah yang efektif dan akuntabel	kasus-kasus sosial	Kenyamanan Lingkungan bagi WNA			
		Pengamanan Kawasan Sanur	Rp154.816.000	Rp147.663.870	95,38
		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Rp147.487.500	Rp134.446.300	91,16
		Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar	Rp535.765.550	Rp521.550.850	97,35
		Monitoring/Pemantauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar	Rp153.003.000	Rp138.624.800	90,60
		Pelatihan Pecalang Guna Pengendalian, Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar	Rp448.934.500	Rp426.979.260	95,11
	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Rp340.035.500	Rp327.741.700	96,38
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Rp 2.880.782.600	Rp 2.678.520.080	92,98

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
		Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	Rp 53.450.000	Rp 45.200.000	84,57
		Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Rp 33.054.000	Rp 31.169.000	94,30
		Bimtek Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Rp 32.312.400	Rp 28.812.400	89,17
	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Rp 71.980.900	Rp 71.038.400	98,69
	Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Rp 70.276.400	Rp 69.291.400	98,60
	Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat	Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Rp 21.984.500	Rp 20.934.500	95,22
	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	Verifikasi Bantuan Parpol	Rp 62.619.200	Rp 51.758.400	82,66
		Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Rp 20.955.000	Rp 20.455.000	97,61

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	pendidikan politik	Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Denpasar	Rp 12.535.000	Rp 12.535.000	100.00
		Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	Rp 50.630.000	Rp 50.630.000	100.00
		Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp 18.690.000	Rp 18.190.000	97,32

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada Tahun 2019 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016 – 2021. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016 – 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sasarannya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam pencapaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2019 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

